

ABSTRAK

Judul : Deskripsi Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Sosial Oleh Yayasan Supersemar. Rumusan masalah yang penulis teliti adalah : (1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Di Kabulkan Sebagian ? (2) Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, (2) Untuk Mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Variable penelitian yang digunakan adalah variable bebas dan variable terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian sedangkan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima. Variable Terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait Perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana sosial sosial oleh Yayasan Supersemar. Hasil dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Di Kabulkan Sebagian karena Terpenuhinya Aspek Formil Gugatan, Adanya Fakta Hukum yang Terbukti di Persidangan, Terpenuhinya Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Tidak Semua Dalil Penggugat Terbukti, Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, Penilaian terhadap Dana Sosial Yayasan. Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris, Adanya Putusan Terdahulu yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Penerapan Asas *Ne Bis In Idem*, Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Gugatan, Perlindungan terhadap Asas Kepastian Hukum, Penerapan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, Koreksi terhadap Kekeliruan *Judex Facti*. Saran dalam penelitian ini adalah Bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, diharapkan meningkatkan kecermatan dan konsistensi dalam menerapkan asas *Ne Bis In Idem* serta memeriksa syarat formil gugatan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis guna menjamin kepastian hukum dan mencegah pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum. Bagi Pengurus Yayasan dan Pemerintah, diharapkan meningkatkan tata kelola, transparansi, administrasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana dan kekayaan yayasan sesuai dengan tujuan sosial dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Dana Sosial, Yayasan Supersemar, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Title: A Description of the Unlawful Act in the Management of Social Funds by the Supersemar Foundation. The research questions addressed are: (1) Why did the District Court Judge rule to partially grant the plaintiff's claim? (2) Why did the Supreme Court Judge declare the plaintiff's claim inadmissible? The research objectives are: (1) To determine the reasons why the District Court Judge partially granted the plaintiff's claim, and (2) To determine the reasons why the Supreme Court Judge declared the plaintiff's claim inadmissible. The research employs a normative legal research method with a qualitative descriptive approach, utilizing primary legal materials (legislation and court rulings) and secondary legal materials (legal literature). Data collection was conducted through literature review, and the data were analyzed qualitatively. The research variables consist of independent and dependent variables. The independent variables are the District Court Judge's decision to partially grant the claim and the Supreme Court Judge's decision to declare the claim inadmissible. The dependent variable is the judicial ruling regarding the unlawful act in the management of social funds by the Supersemar Foundation. The research findings indicate that the District Court Judge partially granted the claim due to the fulfillment of formal claim requirements, proven legal facts established during the trial, the fulfillment of the elements of an unlawful act, the fact that not all of the plaintiff's arguments were proven, considerations based on the Foundation Law, and the assessment of the Foundation's social funds. Conversely, the Supreme Court Judge declared the claim inadmissible due to the Supreme Court's role as *judex juris* (arbiter of law), the existence of a prior ruling with permanent legal force, the application of the *ne bis in idem* principle, the failure to meet formal claim requirements, the protection of the principle of legal certainty, the application of the *res judicata pro veritate habetur* principle, and the correction of errors made by the *judex facti* (arbiter of fact). This study recommends that the Supreme Court and District Courts enhance precision and consistency in applying the *ne bis in idem* principle and in examining the formal requirements of lawsuits; they should provide clear and systematic legal reasoning to ensure legal certainty and prevent the overturning of judgments during the appeals process. Furthermore, it is recommended that foundation administrators and the government improve governance, transparency, administration, and oversight regarding the management of foundation funds and assets—aligning these practices with social objectives and the provisions of the Foundations Law—thereby minimizing potential risks and maintaining public trust.

Keywords: Unlawful Act, Social Funds, Supersemar Foundation, Judicial Decision.